

EDISI : Kamis, 11 April 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASIDAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG



Nama Media : *Radar Bali*

Kategori : *PAD*

# Penghuni Eks SGO Diminta Bayar Sewa

## Untuk Lahan Strategis, Setahun Rp 5 Juta Per Are

**SINGARAJA** - Para penghuni lahan eks Sekolah Guru Olahraga (SGO) Negeri Buleleng, kini diminta membayar sewa. Mereka diminta membayar sewa sesuai dengan hasil penilaian tim appraisal independen. Para penghuni diperkirakan baru memulai membayar sewa tahun ini, setelah sebelumnya menghuni lahan itu tanpa kejelasan status.

Lahan Eks SGO Negeri Buleleng mulai tercatat sebagai aset Pemkab Buleleng sejak 2015 dengan status

### SEWA EKS LAHAN SGO NEGERI BULELENG

- **LAHAN** eks SGO Negeri Buleleng masuk aset Pemkab Buleleng.
- **ADA** 10 KK yang menghuni lahan tersebut.
- **MERUJUK** Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Buleleng, para penghuni akan

dikenakan nilai sewa sesuai acuan tim appraisal.

▪ **MISALNYA**, di Jalan Sahadewa akan disewakan sebesar Rp 46 ribu per meter persegi atau Rp 4.600.000 per are untuk setahun.

▪ **SEDANGKAN** di Simpang Udayana karena strategis disewakan Rp 50 ribu per meter persegi atau Rp 5 juta seare per tahun.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

sertifikat hak pakai (SHP). Dulunya lahan itu adalah milik Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah, aset itu pun dihibahkan ke Pemkab Buleleng. Namun proses peralihan haknya baru

dimulai sejak 2015 lalu.

Hingga kini tercatat ada 10 kepala keluarga yang menghuni lahan tersebut. Para penghuni pun telah diberikan sosialisasi dari pemerintah, bahwa para penghuni harus menyewa lahan tersebut. Hal itu sesuai dengan kebijakan



EKA PRASETYA/RADAR BALI

**DENGARKAN:** Sosialisasi nilai sewa berdasar tim penilai untuk lahan eks Sekolah Guru Olahraga Negeri Buleleng kemarin.

lagi, karena sudah nilai tim appraisal yang independen. Kalau memang dirasa cocok, bisa melanjutkan proses sewa dan pembayaran. Nanti akan dilakukan perikatan perjanjian sewa menyewa sesuai dengan jangka waktu yang disepakati," kata Pasda.

Lebih lanjut Pasda mengatakan, saat ini pemerintah memang berupaya melakukan pemberdayaan lahan-lahan milik pemerintah. Sehingga tak ada kesan bahwa aset yang dikelola pemerintah dalam kondisi terlantar alias mangkrak. Dengan pemanfaatan itu, pemerintah mengklaim bisa mendapat tambahan pendapatan daerah, juga memudahkan sisi pemeliharaan. (eps/gup)

Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Buleleng.

Kabid Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Made Pasda Gunawan mengatakan, pihaknya telah mengundang para penghuni eks lahan SGO. Pemerintah

menyampaikan nilai sewa yang dianggap layak oleh tim appraisal.

Nilai sewa itu bervariasi. Lahan eks SGO yang ada di Jalan Sahadewa misalnya, akan disewakan sebesar Rp 46 ribu per meter persegi atau Rp 4.600.000 per are

untuk setahun. Sementara lahan yang ada di Simpang Udayana, karena lokasinya yang strategis, disewakan Rp 50 ribu per meter persegi atau Rp 5 juta seare per tahun.

"Kami sudah sampaikan nilai itu. Ini sudah tidak bisa ditawar



Media : *Kompas Bali*

Kategori : *Politika*

**POLITIKA**



EKA PRASETIA/ANADAR BALI

**MELANGGAR:** Penurunan alat peraga kampanye oleh Satpol PP Buleleng.

## Pol PP Turunkan Ratusan APK

SINGARAJA - Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng kembali menurunkan ratusan alat peraga kampanye (APK), yang dipasang di penjuru Kabupaten Buleleng. Alat peraga itu sengaja ditertibkan karena sebagian besar melanggar zona pemasangan alat peraga. Selain itu ada beberapa alat peraga lain yang juga melanggar aturan pemasangan.

Penertiban APK itu sudah dilakukan sejak Selasa (9/10) lalu. Hingga kemarin (10/10), penertiban juga belum tuntas. Sebab ada banyak alat peraga yang melanggar ketentuan. Rencananya proses penertiban akan dilanjutkan hari ini (11/4).

Kasat Pol PP Buleleng Putu Dana mengatakan, alat peraga kampanye yang ditertibkan itu sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena dianggap melanggar zona pemasangan atribut kampanye, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. "Ada yang dipasang di fasum. Misalnya banner atau spanduk yang dipasang di tiang listrik atau tiang telepon. Malah ada juga yang memaku atributnya di pohon perindang. Karena tidak sesuai aturan, kami amankan alat peraganya ke kantor," katanya.

Lebih lanjut Dana mengatakan, selama ini atribut-atribut itu kerap menumpuk di gudang milik Pol PP. Sebab selama ini tak pernah diambil oleh pemiliknya. Pihaknya pun belum berencana melakukan pemusnahan. Nantinya proses pemusnahan akan dilakukan setelah melalui koordinasi dengan Bawaslu Buleleng. Hingga kemarin total ada 235 buah alat peraga kampanye yang telah ditertibkan. (eps/gup)



Media : *PADMAH BALI*

Kategori : *KEBUDAYAAN*

## WIJA KUSUMA

### Disbud Kaji Perubahan Sistem

SINGARAJA - Dinas Kebudayaan Buleleng tengah melakukan kajian terhadap sistem pemberian penghargaan Wija Kusuma pada para seniman. Kajian itu diharapkan bisa memberikan sistem yang paling transparan dalam proses pemberian penghargaan tahunan itu.

Evaluasi sistem tersebut dilakukan Disbud setelah selama ini kerap mendapat masukan terkait sistem pemberian penghargaan. Maklum saja sejumlah pihak menganggap penghargaan diberikan tanpa kriteria jelas, bahkan cenderung subjektif.

Kabid Kesenian Dinas Kebudayaan Buleleng Wayan Sujana mengatakan, pihaknya kini tengah mengkaji sistem pemberian penghargaan itu. Kajian itu dilakukan bersama dengan Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) Buleleng. "Kami tengah memperbaiki sistemnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan lebih maksimal lagi pada publik," kata Sujana.

Secara umum, dalam proses pemberian penghargaan nantinya akan dilakukan penilaian dalam bentuk pembobotan nilai. Misalnya lama keterlibatan dalam dunia seni, karya-karya yang dihasilkan, kontribusi dan pengabdian pada dunia seni, serta persyaratan administrasi lainnya. "Supaya ada perangkat lunak yang bisa dijadikan pedoman. Perangkat lunak itu yang akan dijadikan pertanggungjawaban pada publik, apabila ada yang mempertanyakan," imbuhnya. Seiring perkembangan, tak hanya seni tradisi, Disbud juga akan memberikan penghargaan kepada pengabdian seni modern. (eps/gup)



Media : *KORAN BALI*

Kategori : *Aksi Damai*

# Aksi Damai, Mahasiswa Ajak Tak Golput

SINGARAJA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, menggelar aksi damai pagi kemarin (10/4). Para mahasiswa mengajak masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu yang diselenggarakan pada Rabu (17/4) pekan depan.

Aksi damai itu diawali dengan long march dari kampus Undiksha Singaraja menuju Pasar Anyar Singaraja. Mahasiswa membawa sejumlah spanduk dan poster bernada ajakan. Diantaranya bertuliskan "Pastikan kita ambil bagian untuk Indonesia lebih baik 2019", "Pilih dengan dasar hati, bukan dengan dasar materi", dan "Golput hanya untuk golongan orang lemah mending

jangan jadi WNI".

Saat sampai di Pasar Anyar Singaraja, para mahasiswa langsung melakukan orasi secara bergantian. Orasi itu dikawal ketat aparat kepolisian dari Polsek Kota Singaraja dan Polres Buleleng. Aksi itu berhasil mencuri perhatian para pengguna jalan dan masyarakat yang melakukan aktifitas di sekitar pasar. "Kita dihadapkan dengan suguhan yang tidak edukatif.

Antara lain penerapan politik kotor berupa penggunaan isu SARA, politik uang, dan fanatisme yang berlebihan terhadap suatu kelompok atau golongan," papar Koordinator Aksi, I Gusti Lanang Aghistanaya Yogie. "Kami juga mengajak masyarakat menikmati pesta demokrasi ini dengan menciptakan suasana pemilihan yang damai kondusif," tandasnya. (eps/gup)